

Perlawanan Masyarakat Samin Terhadap Kolonialisme Belanda di Bojonegoro Tahun 1890-1917

Lintang Oktafia, Nasution

Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026
Revised 20 June 2026
Accepted 25 June 2026
Available online 08 July 2026

Keywords

Samin community, non-violent resistance, Dutch colonialism, Bojonegoro, colonial policies



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.
Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the resistance of the Samin community to Dutch colonialism in Bojonegoro between 1890 and 1917. Previous studies have primarily positioned Blora and Rembang as the main centers of the Samin Movement, while Bojonegoro has generally been treated only as an area of its expansion. As a result, the relationship between local conditions in Bojonegoro, the control of teak forests, taxation, village obligations, and forms of Samin resistance has not been discussed comprehensively. This study aims to explain the background of the movement and analyze its forms of resistance within the social, economic, and political context of Bojonegoro. It employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources include colonial archives, government regulations, forestry reports, official investigations of the Samin Movement, contemporary newspapers, and oral testimonies. James C. Scott's theory of everyday resistance is used as an analytical framework. The findings show that colonial control over land, forests, labor, taxation, and village administration restricted the community's living space. Samin teachings then became a moral foundation for rejecting these policies. Resistance took the form of refusing to pay taxes, rejecting compulsory labor, opposing state control over forests and village granaries, and disobeying administrative regulations. The colonial government responded through surveillance, arrests, exile, and official investigations.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlawanan masyarakat Samin terhadap kolonialisme Belanda di Bojonegoro pada tahun 1890–1917. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Bojonegoro yang melatarbelakangi munculnya gerakan Samin serta menjelaskan bentuk-bentuk perlawanannya terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan berupa arsip dan dokumen pemerintah kolonial, laporan Dinas Kehutanan Hindia Belanda, Staatsblad van Nederlandsch-Indië, laporan penyelidikan gerakan Samin, surat kabar sezaman, serta sumber lisan. Sumber-sumber tersebut dilengkapi dengan buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teori perlawanan sehari-hari James C. Scott digunakan sebagai alat analisis untuk memahami karakter perlawanan masyarakat Samin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Samin di Bojonegoro muncul akibat semakin kuatnya penguasaan pemerintah kolonial terhadap tanah, hutan jati, tenaga kerja, dan kehidupan administratif masyarakat desa. Kebijakan kehutanan, sistem blandongdiensten, pemungutan pajak, serta kewajiban desa membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya yang sebelumnya menopang kehidupan mereka. Ajaran Samin kemudian berkembang sebagai landasan moral untuk menolak kebijakan yang dianggap tidak adil dan bertentangan dengan pandangan bahwa tanah, air, dan hutan merupakan milik bersama. Perlawanan tersebut diwujudkan melalui penolakan membayar pajak, penolakan terhadap penguasaan hutan dan lumbung desa, penolakan kerja wajib, serta ketidakpatuhan terhadap aturan kolonial. Pemerintah Belanda meresponsnya melalui pengawasan, penangkapan, pengasingan tokoh, dan penyelidikan administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan Samin merupakan bentuk perlawanan non-kekerasan yang memadukan tindakan ekonomi, administratif, moral, sosial, dan budaya dalam menghadapi dominasi kolonial.

PENDAHULUAN

Komunitas Samin merupakan kelompok adat di Jawa yang dikenal karena prinsip-prinsip kesederhanaan, kejujuran, antikekerasan, dan penolakan terhadap penindasan. Gerakan ini

didirikan pada akhir abad ke-19 oleh Samin Surosentiko (Raden Kohar) sebagai respon terhadap ketidakadilan sistem kolonial. Ajaran Samin menekankan bahwa tanah, air, dan hutan adalah milik bersama, sebagaimana diilustrasikan oleh ungkapan "*lemah podho duwe, banyu podho duwe, kayu podho duwe*". Bagi komunitas Samin, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah kolonial tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam nilai-nilai moral dan pengetahuan tradisional masyarakat pedesaan Jawa.¹

Masa kolonial di Hindia Belanda ditandai dengan penerapan kebijakan ekonomi secara fundamental dan mengubah tatanan di bidang agraria dan sosial pada masyarakat lokal. Pemerintah kolonial menerapkan sistem eksploitasi sumber daya alam yang terstruktur; termasuk kebijakan pengelolaan dan penanaman hutan jati (*Tectona grandis*) di pulau Jawa. Pemanfaatan sumber daya alam, terutama hutan jati dan lahan pertanian, secara intensif telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat Jawa. Dalam situasi tersebut, berbagai bentuk perlawanan rakyat pun muncul baik yang bersifat bersenjata maupun yang menempuh jalur tanpa kekerasan sebagai bentuk penolakan terhadap hegemoni dan eksploitasi yang dilakukan oleh kekuasaan kolonial.²

Kebijakan penanaman pohon jati yang diterapkan oleh pemerintah kolonial berdampak pada bidang ekonomi penduduk lokal, sekaligus merubah tatanan sosial dan budaya mereka. yang secara bertahap merusak hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang sebelumnya mereka kelola sebagai mata pencaharian. Komunitas pedesaan kehilangan kebebasan untuk memanen kayu, rotan, atau produk hutan lainnya tanpa persetujuan otoritas kolonial. Pengelolaan jati juga berfungsi sebagai simbol dominasi negara kolonial atas lingkungan alam dan penduduk asli.³

Perlawanan petani Jawa pada masa kolonial tidak semata-mata didorong oleh kesulitan ekonomi, tetapi juga merupakan reaksi terhadap benturan nilai antara tatanan sosial komunal dan spiritual tradisional dengan prinsip-prinsip kapitalisme kolonial yang memandang tanah dan sumber daya mineral hanya sebagai komoditas. Bagi masyarakat agraris Jawa, tanah, air, dan hutan bukan sekadar alat produksi, melainkan komponen integral dari identitas sosial dan pandangan dunia mereka. Oleh karena itu, eksploitasi kolonial atas sumber daya ini dianggap sebagai penjarahan yang mengancam kelangsungan hidup dan keseimbangan sosial masyarakat.⁴

Dalam konteks tersebut, Gerakan Samin merupakan salah satu bentuk resistensi masyarakat yang menempuh jalur non-kekerasan melalui tindakan menolak pembayaran pajak, menolak kerja paksa, serta tidak mengakui legitimasi pemerintah kolonial. Gerakan ini mulai berkembang di Randublatung, Blora, sekitar tahun 1890, kemudian meluas ke wilayah Bojonegoro, terutama di daerah Tapelan dan Margomulyo yang berada di kawasan hutan jati. Perluasan ajaran Samin di Bojonegoro berkaitan erat dengan kondisi geografis dan struktur sosial masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan pada hutan sebagai ruang ekonomi sekaligus lingkungan tempat mereka bertahan hidup.⁵

Bojonegoro memiliki peran penting dalam perkembangan Saminisme karena hutan jatinya yang luas, yang menjadi sasaran utama eksploitasi kolonial oleh Boschwezen (Dinas Kehutanan Kolonial). Kebijakan yang membatasi akses penduduk terhadap hasil hutan menyebabkan ketegangan antara negara dan penduduk desa serta berkontribusi pada penerimaan ajaran Samin sebagai bentuk perlawanan budaya. Catatan arsip kolonial

¹ Siti Munawaroh, Christiyati Ariani, and Suwarno, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup)* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

² Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 32.

³ Ita Liani, Firza Fadilla, and Agus Danugroho, "Asal Muasal Wong Jonegoro : Tinjauan Historis Hubungan Wong Kalang Dan Masyarakat Samin Bojonegoro," *Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 4, no. 2 (2021), hlm. 5.

⁴ Nawiyanto and E K O Crys Endrayadi, "The Saminist Movement of the Kendeng Mountains Complex of Java during the Dutch Kolonial and Indonesia 's Reform Eras" 8, no. April (2017), hlm. 118.

⁵ A Widyarsono, "Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan," *UNISIA*, no. 36 (1998).

menunjukkan bahwa gerakan Samin berkembang di Tapelan, Bojonegoro, sejak tahun 1890, dan perlawanan damai terhadap peraturan kolonial terjadi pada tahun 1917.⁶

Periode tahun 1890 hingga 1917 merupakan tahap penting dalam perkembangan Gerakan Samin di Bojonegoro, di mana gerakan tersebut mengalami pertumbuhan, mencapai puncak aktivitas perlawanan, dan menghadapi tindakan represif dari pemerintah kolonial. Dalam laporan Residen Rembang pada Januari 1903, disebutkan bahwa terdapat 772 pengikut Samin yang tersebar di 34 desa di Kabupaten Blora, dan pada awal 1907, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 3.000 hingga 5.000 orang. Pemerintah Hindia Belanda terkejut dan khawatir ketika pada Maret 1907 beredar kabar tentang kemungkinan terjadinya pemberontakan. Mereka menanggapi situasi tersebut dengan menangkap Samin Surosentiko dan mengasingkannya ke Padang, di mana ia meninggal di Sawahlunto pada 1914. Perlawanan Samin di Bojonegoro memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan gerakan serupa di daerah lain. Ajaran Samin di wilayah ini tidak hanya menekankan penolakan terhadap kekuasaan kolonial, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan spiritual yang menekankan kesederhanaan, kejujuran, dan hidup harmonis dengan alam.⁷

Gerakan Saminisme memiliki peran penting dalam sejarah perlawanan Indonesia, pemahaman mendalam tentang dinamika gerakan ini, terutama di wilayah Bojonegoro, masih terbatas. Sebagian besar literatur yang tersedia umumnya membahas Saminisme secara keseluruhan atau menekankan wilayah Blora sebagai titik awal gerakan tersebut. Namun, perkembangan gerakan Samin di Bojonegoro ditandai oleh konteks lokal yang unik, pendekatan perlawanan yang beragam, serta implikasi sosial dan politik yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Keterbatasan penelitian ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana Gerakan Samin beradaptasi dengan situasi lokal di Bojonegoro, reaksi pemerintah kolonial terhadapnya, serta proses kelanjutan atau perubahan gerakan tersebut sepanjang periode 1890 hingga 1917.⁸

Dalam kajian sebelumnya, penelitian-penelitian yang sering kali terfokus pada aspek-aspek tertentu dari kebijakan kolonial, tanpa memberikan analisis holistik yang mencakup dampak jangka panjang terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat Samin sebagian besar studi menganalisis dampak pajak atau eksploitasi sumber daya alam secara terpisah, tanpa mengeksplorasi hubungan antara kedua aspek tersebut dalam konteks masyarakat Samin. Studi ini diperlukan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada mengenai dinamika pengaruh kebijakan kolonial terhadap kelompok lokal, terutama melalui pendekatan yang menekankan interaksi kebijakan dan implikasinya terhadap dimensi sosial dan budaya masyarakat.

Menyitir penelitian yang dilakukan oleh Widyarsono, Benda, dan Castles, dan Nawiyanto menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perkembangan Gerakan Samin masih sangat berfokus pada wilayah Blora dan Rembang sebagai titik awal penyebaran ajarannya. Selanjutnya, Bojonegoro yang juga merupakan wilayah penting dalam perkembangan Saminisme, terutama terkait perlawanan terhadap kebijakan pengelolaan hutan kolonial dan pembatasan akses ekonomi bagi komunitas pedesaan belum mendapat studi mendalam. Penelitian terbatas yang menyoroti Bojonegoro pada periode 1890–1917 menunjukkan perlunya studi baru yang menjadikan Bojonegoro sebagai pusat analisis untuk memahami dinamika perlawanan komunitas Samin dalam konteks kolonial.

Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengisi kekosongan yang ada dalam penelitian sebelumnya dan memberikan perspektif baru dalam historiografi lokal mengenai perlawanan

⁶ Ingesteld Ingevolge And H E T Gouver, "Verslag Betreffende Het Onderzoek In Zake De Saminbeweging," N.D, hlm. 37.

⁷ H Benda and L. Castles, "the samin movement" 125 (1968), hlm. 211.

⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

non-kekerasan yang dilakukan oleh komunitas Samin di Bojonegoro sebagai respon terhadap kebijakan kolonial yang eksploitatif. Melalui penelitian historis pada periode 1890–1917, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari munculnya perlawanan komunitas Samin serta menyoroti kontribusinya terhadap sejarah perjuangan komunitas pedesaan Jawa melawan kolonialisme. Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi akademis dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara pengendalian sumber daya alam, otoritas negara, dan strategi perlawanan komunitas lokal dalam kerangka kolonial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo. Penelitian sejarah merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, logis, dan objektif melalui penerapan langkah-langkah metodologis yang terstruktur. Proses ini mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran makna dari data sejarah), serta historiografi (penulisan hasil rekonstruksi peristiwa sejarah).⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Gerakan Samin Di Bojonegoro Tahun 1890–1917

Penyebaran Gerakan Samin di Bojonegoro

Gerakan Samin berawal dari ajaran yang disampaikan oleh Soerontiko Samin atau Samin Surosentiko di Dukuh Ploso, Desa Kediren, Onderdistrict Kawedanan, District Randublatung, Afdeeling Blora. Ajaran tersebut pada awalnya berkembang di sekitar tempat tinggal Soerontiko Samin, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di sekitarnya, meliputi Bojonegoro, Rembang, Ngawi, Madiun, Grobogan, Pati, dan Kudus. Penyebaran tersebut memperlihatkan bahwa Gerakan Samin tidak hanya berkembang sebagai gerakan yang terpusat di Blora, tetapi membentuk jaringan antardaerah yang dihubungkan oleh kedekatan geografis dan hubungan sosial masyarakat pedesaan.

Penyebaran Gerakan Samin di Bojonegoro menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kedudukan penting dalam perkembangan Saminisme di luar daerah asalnya, yaitu Blora. Laporan penyelidikan pemerintah kolonial tahun 1918 menyebutkan bahwa ajaran Samin telah masuk ke Desa Tapelan, Onderdistrict Ngraho, District Tambakrejo, Afdeeling Bojonegoro sejak tahun 1890, dengan ditemukannya lima orang pengikut Samin di desa tersebut. Data ini memperlihatkan bahwa Bojonegoro bukan hanya menjadi daerah perluasan pada masa berikutnya, tetapi sudah terlibat sejak fase awal penyebaran ajaran Samin. Pada tahun 1907, Gerakan Samin bahkan telah memiliki sekitar 3.000 pengikut, dengan kurang lebih 1.500 orang berada di Afdeeling Blora, sedangkan sisanya tersebar di Bojonegoro, Grobogan, dan Ngawi.¹⁰

Masyarakat samin di daerah Bojonegoro tersebar diberbagai daerah yakni Desa Tapelan, Onderdistrict Ngraho, District Tambakredjo, Afdeeling Bojonegoro, Residentie Rembang. dengan kelompok terbesar berada di Tapelan, Ngraho. Keterangan ini memperlihatkan bahwa penyebaran Gerakan Samin di Bojonegoro berlangsung melalui wilayah-wilayah pedesaan yang secara geografis berdekatan dengan daerah asal gerakan di Blora. Oleh karena itu, Tapelan dapat dipahami sebagai salah satu pusat penting penyebaran Samin di Bojonegoro, terutama karena

⁹ Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah," 2018, hlm.62.

¹⁰ *Verslag Saminbeweging* (1918), *op.cit.*, hlm 4

daerah tersebut sudah tercatat memiliki pengikut Samin sejak masa awal perkembangan gerakan.¹¹

Penyebaran Gerakan Samin di Bojonegoro berlangsung secara bertahap melalui hubungan antardesa dan kedekatan masyarakat dengan wilayah Blora sebagai pusat awal gerakan. Laporan penyelidikan tahun 1918 menjelaskan bahwa perluasan ajaran Samin tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pemimpin utamanya, tetapi juga melalui masyarakat dari daerah sekitar yang datang menemui tokoh-tokoh Samin di Blora, kemudian membawa ajaran tersebut kembali ke daerah asalnya. Pola penyebaran semacam ini memperlihatkan bahwa Gerakan Samin berkembang melalui jaringan sosial masyarakat pedesaan, bukan melalui organisasi resmi. Di Bojonegoro, ajaran Samin mudah diterima karena masyarakat menghadapi persoalan yang hampir sama, terutama berkaitan dengan pungutan uang, pajak kepala, dan kenaikan landrente yang dirasakan semakin memberatkan kehidupan desa.¹²

Tokoh utama dalam jaringan penyebaran tersebut tetap Soerontiko Samin sebagai sumber ajaran. Laporan kolonial dan penelitian Benda serta Castles juga menyebut Surohidin dan Karsijah sebagai tokoh yang membantu menyebarkan ajaran Samin ke daerah-daerah lain. Surohidin merupakan menantu Soerontiko Samin dan dikenal memiliki pengaruh cukup kuat dalam perkembangan jaringan Samin di luar desa asalnya. Karsijah juga disebut sebagai salah seorang menantu sekaligus penyebar ajaran Samin. Akan tetapi, sumber yang tersedia tidak menunjukkan secara pasti bahwa Surohidin maupun Karsijah menjadi pemimpin lokal di Tapelan. Karena itu, keduanya lebih tepat ditempatkan sebagai tokoh dalam jaringan regional Gerakan Samin, sedangkan perkembangan gerakan di Bojonegoro dijalankan oleh pengikut-pengikut lokal yang sebagian besar namanya tidak tercatat dalam laporan kolonial.

Karakteristik Gerakan Samin di Bojonegoro

Gerakan Samin yang berkembang di Bojonegoro tidak melahirkan ajaran baru yang sepenuhnya berbeda dari Saminisme di Blora. Nilai-nilai dasarnya tetap bersumber dari ajaran Soerontiko Samin mengenai kejujuran, kesabaran, kesetaraan, kemandirian, kerja keras, dan penolakan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil. Perbedaannya terutama terdapat pada penerapan ajaran tersebut dalam menghadapi kondisi lokal masyarakat Bojonegoro. Oleh karena itu, karakter Gerakan Samin di Bojonegoro perlu dipahami melalui hubungan antara ajaran Samin dengan persoalan tanah pertanian, kawasan hutan jati, kewajiban desa, dan campur tangan pemerintah kolonial dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Gerakan Samin tidak berkembang secara seragam karena pengikut di setiap daerah menghadapi persoalan yang berbeda dan menyesuaikan tindakannya dengan keadaan setempat.

Letak geografis permukiman pengikut Samin menjadi salah satu unsur yang membentuk karakter gerakan di Bojonegoro. Tapelan berada di wilayah barat Bojonegoro yang berdekatan dengan Blora dan memiliki hubungan erat dengan kawasan hutan jati. Kehidupan masyarakat di wilayah tersebut tidak hanya bergantung pada lahan pertanian, tetapi juga pada sumber daya hutan untuk memperoleh kayu bakar, pakan ternak, bahan bangunan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Ketika pemerintah kolonial mempertegas batas kawasan hutan serta membatasi pemanfaatannya, masyarakat mengalami perubahan dalam hubungan mereka dengan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk menopang kehidupan. Kondisi tersebut menyebabkan pandangan mengenai tanah, air, dan kayu sebagai milik bersama memperoleh makna yang kuat bagi pengikut Samin di Bojonegoro.¹³

¹¹ Panitia Penggali dan Penyusun Sejarah Hari-Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, *Sejarah Kabupaten Bojonegoro: Menyingkap Kehidupan Dari Masa Ke Masa* (Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, 1988).hlm. 184

¹² *Verslag Saminbeweging* (1918), *op.cit.*,hlm. 7

¹³ Benda dan Castles, *op.cit.*, hlm. 221

Kebijakan kolonial terhadap hutan tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh kebutuhan hidup, tetapi juga mengubah pengertian mengenai hak atas sumber daya alam. Agus B. Purwanto menjelaskan bahwa istilah “pencurian kayu” berkembang seiring dengan pembentukan sistem pengelolaan hutan kolonial. Masyarakat sekitar hutan sebelumnya memandang pengambilan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai hak yang melekat pada kehidupan mereka. Sebaliknya, pemerintah kolonial menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kawasan milik negara. Perbedaan pengertian mengenai hak atas hutan inilah yang menjadi salah satu sumber ketegangan antara masyarakat Samin dan aparat kehutanan.¹⁴

Karakter Gerakan Samin di Bojonegoro juga tampak dalam sikap pengikutnya terhadap lembaga-lembaga desa. *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* tanggal 15 Maret 1907 memberitakan bahwa pengikut Samin mulai memisahkan diri dari sejumlah kewajiban desa. Mereka tidak bersedia ikut mendirikan lumbung desa, menyimpan benih dalam lumbung bersama, dan di wilayah Bojonegoro juga menolak menempatkan ternak di kandang bersama. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa pengikut Samin tidak hanya berhadapan dengan pejabat pemerintah kolonial, tetapi juga dengan perangkat desa yang menjalankan kebijakan pemerintah. Desa tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai ruang kehidupan bersama karena kepala desa dan lembaga-lembaganya telah menjadi bagian dari sistem administrasi kolonial.¹⁵

Pemberitaan *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* menggunakan istilah *Javaansche anarchisten* atau “kaum anarkis Jawa” untuk menyebut pengikut Samin. Penyebutan tersebut mencerminkan sudut pandang kolonial yang menganggap ketidakpatuhan sebagai ancaman terhadap ketertiban. Padahal, penolakan terhadap kewajiban desa tidak selalu berarti bahwa pengikut Samin menolak kehidupan bermasyarakat. Mereka tetap menjalankan hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat sekitar, tetapi menolak kewajiban yang dianggap tidak memiliki dasar yang adil. Berita kolonial dengan demikian dapat digunakan sebagai bukti mengenai tindakan ketidakpatuhan Samin, tetapi penilaian yang diberikan terhadap mereka harus dibaca melalui kritik sumber.

Pandangan mengenai citra negatif tersebut juga muncul dalam hasil wawancara dengan Bambang Sutrisno yang biasa disapa akrab dengan panggilan Pak Tris. Berdasarkan penuturan keluarga, Pak Tris merupakan generasi kelima dalam garis pewaris ajaran Soerontiko Samin di Bojonegoro. Ia menjelaskan bahwa gambaran mengenai masyarakat Samin sebagai kelompok yang bodoh, keras kepala, dan tidak mau menaati aturan merupakan citra yang berkembang sejak masa kolonial. Menurutny, citra negatif itu menyebabkan sebagian keturunan Samin merasa malu untuk mengakui identitasnya. Penuturan tersebut menunjukkan bahwa ingatan mengenai stigma kolonial masih bertahan dalam komunitas Samin dan menjadi bagian dari pengalaman sosial keturunannya.¹⁶

Permasalahan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan Gerakan Samin di Bojonegoro. Tjipto Mangoenkoesomo dalam laporannya mengenai Saminisme menyinggung kecenderungan pengikut Samin untuk mempertahankan hak atas tanah yang mereka kuasai dan kerjakan. Victor T. King kemudian menjelaskan bahwa Gerakan Samin tidak hanya menjadi reaksi terhadap kenaikan pajak dan peraturan kehutanan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan kebijakan desa yang memperkuat penguasaan pemerintah serta kepala desa

¹⁴ Agus B. Purwanto, “Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX,” *Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (Oktober 2015), hlm. 140

¹⁵ “Javaansche anarchisten,” *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 15 Maret 1907, No. 62, 12e Jaargang, Eerste Blad, hlm. 2, kolom 1.

¹⁶ Wawancara Bambang Sutrisno, Bojonegoro, 26 November 2025.

terhadap tanah. Kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan petani yang menghendaki kepastian dalam mengerjakan dan memanfaatkan lahan.¹⁷

Permasalahan penguasaan tanah terlihat dalam peristiwa di Tapelan pada tahun 1914. Sejak tahun 1912, sejumlah komunitas samin menyewa tanah desa yang berada di tepi Bengawan Solo. Ketika tanah tersebut kemudian dialihkan kepada penyewa baru, mereka menolak meninggalkannya dengan alasan bahwa tanah seharusnya menjadi hak orang yang mengerjakan dan memanfaatkannya. Mereka menyatakan mengetahui hak-haknya dan tetap mempertahankan lahan sampai pemerintah mengerahkan polisi untuk melakukan pengosongan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pandangan Samin mengenai tanah tidak hanya bersifat filosofis, tetapi diterapkan dalam sengketa agraria yang nyata.¹⁸

Peristiwa Tapelan menunjukkan bahwa konsep “perlawanan pasif” tidak sepenuhnya mampu menggambarkan tindakan masyarakat Samin di Bojonegoro. Saat berhadapan dengan aparat, sebagian pengikut membawa cangkul dan sabit yang biasa digunakan dalam kegiatan bertani. Hal ini menandakan adanya bentuk konfrontasi terbuka, meskipun tidak disertai niat untuk melakukan pemberontakan bersenjata atau menjatuhkan pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, peristiwa tersebut lebih tepat dipahami sebagai usaha mempertahankan hak atas lahan garapan yang kemudian berkembang menjadi ketegangan langsung dengan aparat pemerintah.

Perlawanan Samin juga dijalankan melalui strategi yang lebih halus dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya melalui tindakan terbuka seperti di Tapelan. Pak Tris menjelaskan bahwa perlawanan Soerontiko Samin memiliki dua prinsip utama, yaitu tidak menggunakan kekerasan dan tetap memegang kejujuran. Menurut ingatan yang diwariskan dalam keluarga, pengikut Samin tidak selalu menolak perintah aparat secara langsung, tetapi menjalankannya secara harfiah sehingga perintah tersebut tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Sebagai contoh, ketika diperintah “membersihkan rumah”, seluruh isi rumah dikeluarkan karena perintah tersebut ditafsirkan sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Tindakan semacam itu dilakukan agar pengikut Samin dianggap tidak cocok dijadikan tenaga kerja dan tidak kembali diperintah oleh pemerintah kolonial.¹⁹

Kejujuran juga tidak dipahami sebagai kewajiban untuk membuka seluruh informasi kepada pihak lain. Pak Tris memberikan contoh penggunaan jawaban harfiah ketika berhadapan dengan pertanyaan aparat. Apabila ditanya dari mana, seseorang dapat menjawab “dari belakang”, sedangkan ketika ditanya hendak ke mana dapat menjawab “ke depan”. Jawaban tersebut tetap dianggap benar, tetapi tidak memberikan informasi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ingatan keluarga Samin, cara berbicara seperti itu menjadi strategi untuk mempertahankan prinsip kejujuran sekaligus melindungi sesama pengikut dari pengawasan pemerintah kolonial.²⁰

Penuturan tersebut memperkuat pemahaman bahwa perlawanan Samin tidak selalu dilakukan melalui tindakan besar dan terbuka. Penolakan dapat diwujudkan melalui cara menjawab pertanyaan, menafsirkan perintah secara harfiah, membatasi informasi, serta menghindari kewajiban tanpa berhadapan langsung dengan aparat. Strategi seperti ini memiliki kesesuaian dengan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott, terutama karena dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan formal. Namun, karena

¹⁷ Tjipto Mangoenkoesoemo, *Het Saminisme: Rapport Uitgebracht aan de Vereeniging “Insulinde”* (Semarang: N.V. Semarang-Drukkerij en Boekhandel H.A. Benjamins, 1918), hlm. 15

¹⁸ *Verslag Saminbeweging* (1918), *op.cit.* hlm 15

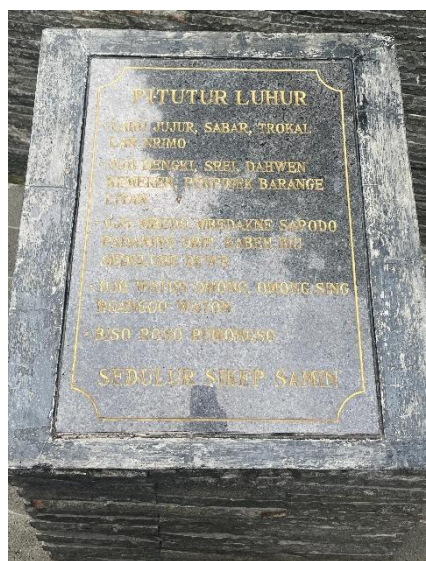
¹⁹ Wawancara Bambang Sutrisno, *loc.cit.*

²⁰ Ibid.,

penuturan Pak Tris merupakan ingatan yang diwariskan antargenerasi, keterangan tersebut digunakan untuk memahami sudut pandang internal komunitas dan tetap perlu dibandingkan dengan sumber kolonial sezaman.

Nilai yang mendasari tindakan tersebut masih diwariskan dalam kehidupan masyarakat Samin di Bojonegoro. Bambang Sutrisno menjelaskan bahwa ajaran Samin berpusat pada keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perilaku. Ketiga unsur tersebut merupakan pedoman yang tidak dapat dipisahkan. Pikiran yang baik harus melahirkan ucapan yang baik, sedangkan ucapan perlu diwujudkan melalui tindakan yang sesuai. Ketidaksesuaian antara pikiran, ucapan, dan perilaku menunjukkan bahwa seseorang belum menjalankan ajaran Samin secara utuh.²¹

Pak Tris juga menjelaskan empat nilai yang dijalankan secara berurutan, yaitu jujur, sabar, *trokal*, dan *nrimo*. Kejujuran menjadi dasar dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Kesabaran diperlukan dalam menjalani suatu proses, tetapi harus disertai *trokal*, yaitu usaha yang



Gambar 1 Pitutur Luhur Sedulur Sikep Samin di Desa Margomulyo.

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis pada 26 November 2025

dilakukan secara sungguh-sungguh. Setelah berusaha, seseorang perlu memiliki sikap *nrimo* atau ikhlas menerima hasilnya. Urutan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Samin tidak menolak kerja, tetapi justru menempatkan usaha dan kesungguhan sebagai bagian penting dalam kehidupan.²²

Nilai-nilai tersebut juga dituangkan dalam prasasti *Pitutur Luhur* yang terdapat di lingkungan komunitas Sedulur Sikep Samin di Desa Margomulyo. Prasasti itu memuat ajaran “laku jujur, sabar, trokal lan nrimo” serta larangan memiliki sifat dengki, iri, serakah, dan mengambil barang milik orang lain. Ajaran lainnya menekankan larangan membedakan sesama manusia, berbicara tanpa dasar, serta pentingnya memiliki *rasa rumangsa*. Keberadaan prasasti tersebut menunjukkan bahwa ajaran yang sebelumnya diwariskan melalui *pitutur* lisan kini juga ditampilkan dalam bentuk visual agar dapat terus dipahami oleh anggota komunitas dan generasi berikutnya.²³

Makna *rasa rumangsa* dijelaskan oleh Pak Tris melalui prinsip bahwa seseorang tidak seharusnya melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain apabila dirinya juga tidak ingin menerima perlakuan yang sama. Prinsip tersebut dicontohkan melalui ungkapan bahwa apabila

²¹ Ibid.,

²² Ibid.,

²³ Dokumentasi pribadi penulis, Desa Margomulyo, 26 November 2026.

seseorang merasa sakit ketika dicubit, ia juga tidak boleh mencubit orang lain. Istilah “Samin” dalam tradisi keluarga juga dimaknai melalui ungkapan *sami-sami*, yaitu kesamaan manusia dan larangan membedakan seseorang berdasarkan kedudukan maupun latar belakangnya. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa penolakan terhadap kekerasan tidak hanya menjadi strategi menghadapi pemerintah kolonial, tetapi juga berakar pada ajaran moral mengenai hubungan antarmanusia.

Gerakan Samin di Bojonegoro juga memperlihatkan pola kepemimpinan lokal yang relatif kolektif. Sumber kolonial menyebut Soerontiko Samin sebagai pendiri ajaran serta Surohidin dan Karsijah sebagai bagian dari jaringan penyebarannya. Namun, laporan yang tersedia tidak menyebutkan dengan jelas nama pemimpin lokal di Tapelan selama periode 1890–1917. Lima pengikut awal pada tahun 1890 maupun para pengikut yang terlibat dalam sengketa tanah tahun 1914 lebih sering dicatat sebagai kelompok. Berdasarkan sumber yang tersedia, perkembangan Samin di Bojonegoro lebih tepat dipahami sebagai gerakan yang dijalankan melalui jaringan keluarga dan pengikut lokal daripada gerakan yang bergantung pada seorang pemimpin karismatik setempat.

Karakter Gerakan Samin di Bojonegoro dapat terlihat lebih jelas apabila dibandingkan dengan perkembangannya di daerah lain. Blora merupakan tempat lahirnya ajaran, kediaman Soerontiko Samin, dan wilayah dengan jumlah pengikut terbesar. Di Grobogan, perkembangan gerakan lebih jelas dihubungkan dengan Surohidin dan Pak Engkrak. Di Pati terdapat Karsijah yang menggunakan gelar Pangeran Sendang Janur, sedangkan perlawanan di Desa Larangan sempat berkembang menjadi bentrokan dengan kepala desa dan aparat kepolisian. Di wilayah Madiun, penyebaran ajaran dikaitkan dengan Wongsoredjo dan Prodjodikromo serta disertai ramalan mengenai perubahan kekuasaan. Sementara itu, sumber mengenai Bojonegoro lebih banyak memperlihatkan persoalan hak penggarap, pemanfaatan hutan, kemandirian keluarga, dan penolakan terhadap kewajiban administratif desa.²⁴

Keteguhan komunitas Samin di Bojonegoro terlihat setelah Soerontiko Samin ditangkap dan diasingkan pada tahun 1907. Hilangnya pemimpin utama tidak langsung mengakhiri perkembangan gerakan yang telah terbentuk. Pengikut lokal tetap mempertahankan ajaran melalui hubungan keluarga, *pitutur*, dan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1914, komunitas Tapelan masih mampu melakukan tindakan bersama untuk mempertahankan tanah yang mereka kerjakan. Penyelidikan pemerintah kolonial tahun 1917 kemudian mencatat sebanyak 283 kepala keluarga Samin di Bojonegoro, menjadikannya wilayah dengan jumlah pengikut terbesar kedua setelah Blora.²⁵

Karakter Gerakan Samin di Bojonegoro dapat dilihat melalui beberapa unsur. Pertama, gerakan berkembang di lingkungan masyarakat agraris yang memiliki hubungan erat dengan tanah pertanian dan kawasan hutan jati. Kedua, pengikutnya menempatkan kerja sebagai dasar hak atas tanah dan hasil pertanian. Ketiga, mereka mempertahankan kemandirian keluarga dari kewajiban pemerintah dan lembaga desa yang dianggap tidak adil. Keempat, perlawanannya dilakukan tanpa kekerasan melalui ketidakpatuhan, penggunaan bahasa secara harfiah, pembatasan informasi, dan dalam keadaan tertentu melalui tindakan terbuka untuk mempertahankan tanah. Kelima, ajarannya diwariskan melalui *pitutur*, hubungan keluarga, dan keteladanan tanpa menggunakan paksaan.

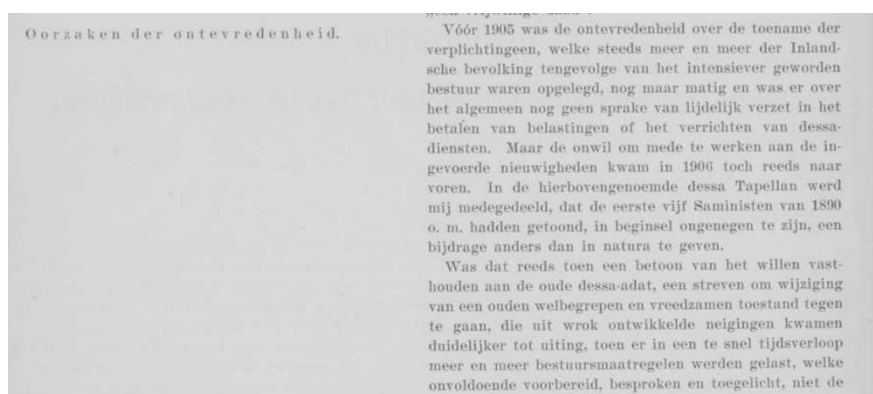
²⁴ A. Pieter E. Korver, “The Samin Movement and Millenarism,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 132, no. 2/3 (1976), hlm. 249

²⁵ *Verslag Saminbeweging* (1918), *loc.cit.* hlm 15

Perlawanan Komunitas Samin Terhadap Kolonialisme Di Bojonegoro Tahun 1890–1917 Penolakan Terhadap Pajak

Penolakan membayar pajak adalah bentuk perlawanan paling konsisten yang dilakukan komunitas Samin di Bojonegoro. Ia bukan tindakan impulsif atau sekadar keengganan. Di baliknya ada keyakinan ideologis yang mengakar: bahwa tanah, air, dan kayu adalah warisan leluhur yang tidak bisa dijadikan dasar pemungutan oleh pemerintah asing. Ketika aparat kolonial datang menagih *landrente* (pajak tanah) ke desa-desa Samin di Tapelan dan Ngraho, jawaban yang mereka terima selalu sama—bukan penolakan terbuka yang mudah diproses secara hukum, melainkan keheningan, atau kata-kata yang berputar tanpa arah, yang membuat petugas pajak frustrasi tanpa punya cukup alasan untuk menangkap siapapun.²⁶

Sistem *landrente* sendiri sudah menjadi beban berat bagi petani Jawa jauh sebelum gerakan Samin muncul. Pajak tanah ini pertama kali diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) dan kemudian disempurnakan oleh Thomas Stamford



Gambar 2Pengikut samin Bojonegoro yang menolak membayar pajak.
Sumber : *Verslag betreffende het Onderzoek inzake de Saminbeweging*

Raffles pada masa pendudukan Inggris (1811–1816) sebagai pengganti sistem *pacht* (sewa tanah) yang dianggap lebih sederhana secara administratif.²⁷ Setelah Belanda kembali berkuasa, sistem ini dipertahankan dan bahkan diperluas jangkauannya. Di Bojonegoro yang tanahnya tidak terlalu subur dan sangat bergantung pada musim, penetapan *landrente* yang kaku tanpa memperhitungkan hasil panen sesungguhnya adalah hukuman bagi petani yang panennya gagal sekalipun.²⁸

Laporan resmi penyelidikan pemerintah kolonial — *Verslag betreffende het onderzoek inzake de Saminbeweging* yang disusun berdasarkan Keputusan Pemerintah 1 Juni 1917 No. 20 dan diterbitkan oleh Landsdrukkerij Batavia pada 1918 merekam proses ini dengan sangat rinci, karena disusun berdasarkan kunjungan langsung ke desa-desa Samin di seluruh wilayah, termasuk Bojonegoro.

Dari laporan itu terungkap fakta di Desa Tapelan (onderdistrict Ngraho, district Tambakredjo, afdeeling Bodjonegoro), pada 1890 sudah dikenal lima orang Samin pertama. Mereka pada masa awal itu masih menjalankan praktik keagamaan Islam dan bahkan membayar pajak namun dengan cara yang berbeda dari penduduk biasa. Laporan Residen Rembang

²⁶ Harry J. Benda dan Lance Castles, "The Samin Movement," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 125, No. 2 (1969), hlm. 215–216

²⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900*, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 312.

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Sejarah Kabupaten Bojonegoro: Menyingskap Kehidupan dari Masa ke Masa* (Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 1988), hlm. 68.

tertanggal 4 Maret 1907 No. 2582/4 yang dikutip dalam verslag Jasper menyatakan secara eksplisit:

"Belastingen werden door hen nog goedschiks betaald, ofschoon, zooals nu blijkt, hier en daar enkelen hunner toch te kennen hebben gegeven, dat zij dit niet als een verplichting tegenover de negeri beschouwen, maar als een vrijwillige daad."

Artinya: pajak masih mereka bayar dengan tertib, tetapi dan ini yang penting bukan karena mereka mengakui kewajiban itu. Mereka membayar karena memilih untuk membayar, bukan karena negara punya hak untuk meminta. Perbedaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi ia adalah akar dari seluruh perlawanan yang kemudian berkembang: penolakan bukan terhadap pajak sebagai angka, melainkan terhadap klaim legitimasi negara kolonial di balik pajak itu.²⁹



Gambar 3 Pemberitaan tentang Penolakan Pajak oleh Pengikut Samin Tahun 1907.

Sumber: "Javaansche anarchisten," *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 15 Maret 1907, hlm. 2, kol. 1-2, koleksi Delpher

Eskalasi terjadi pada 1907, ketika jumlah pengikut Samin di seluruh wilayah diperkirakan sudah mencapai 3.000 hingga 5.000 orang dengan konsentrasi terbesar tetap di Tapelan, Bojonegoro.³⁰ Penolakan terhadap pajak di kalangan pengikut Samin berkembang secara bertahap. Menurut laporan Residen Rembang yang dimuat dalam surat kabar *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, pada mulanya para pengikut Samin masih membayar pajak dengan baik, tetapi sebagian dari mereka tidak lagi menganggap pembayaran tersebut sebagai kewajiban kepada negara, melainkan sebagai pemberian sukarela. Soerontiko Samin sendiri disebut telah menolak membayar *landrente* tahun 1906, meskipun pada awalnya ia belum mendorong para pengikutnya melakukan tindakan yang sama karena mereka dianggap belum cukup "murni". Sikap tersebut kemudian berkembang ketika beredar kabar bahwa seluruh pengikut Samin akan menolak membayar pajak. Penolakan itu juga dikaitkan dengan ajaran mengenai *Igama Adam*, yaitu gambaran tentang suatu tatanan kehidupan ketika masyarakat tidak lagi membayar pajak dan para pejabat yang berada dalam kekuasaan kolonial kehilangan kedudukannya. Dengan demikian, penolakan pajak tidak hanya muncul sebagai keberatan terhadap beban ekonomi,

²⁹ *Verslag Saminbeweging* (1918), op.cit hlm. 1.

³⁰ *Verslag Saminbeweging* (1918), op.cit hlm. 4.

tetapi juga sebagai penolakan terhadap kewenangan pemerintah kolonial dalam menentukan dan memaksakan kewajiban kepada masyarakat desa.³¹

Pengasingan Samin Surosentiko pada Juli 1907 berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal No. 5 tanggal 5 Juli 1907 tidak menghentikan penolakan pajak di Bojonegoro. Ini adalah fakta yang paling penting untuk dipahami. Selama hampir satu dekade setelah pengasingan pemimpinnya, komunitas Samin di Tapelan dan Margomulyo tetap menolak membayar pajak. *Politiek Verslag* Residen Rembang tahun 1908 mencatat dengan nada frustrasi bahwa meskipun Samin sudah diasingkan, perilaku pengikutnya di Bojonegoro tidak berubah penolakan pajak berlanjut, dan aparat tidak punya cara efektif untuk mengatasinya tanpa menimbulkan keributan yang lebih besar.³²

Penolakan membayar pajak bukan hanya bagian kecil dari sejarah Saminisme, melainkan pintu masuk untuk memahami watak perlawanan masyarakat Samin secara lebih luas. Dari penolakan pajak terlihat bahwa perlawanan Samin bukan pemberontakan bersenjata, tetapi perlawanan moral, sosial, dan administratif. Ia lahir dari kehidupan sehari-hari, dijalankan melalui tindakan pasif, dan berakar pada pandangan bahwa pemerintah kolonial tidak memiliki hak untuk menguasai tanah, tenaga, dan hasil kerja masyarakat. Dalam konteks Bojonegoro tahun 1890–1917, penolakan pajak menjadi salah satu bentuk paling jelas dari perlawanan masyarakat Samin terhadap kolonialisme Belanda.

Penolakan Terhadap Penguasaan Hutan

Salah satu bentuk perlawanan masyarakat samin adalah penolakan terhadap penguasaan hutan oleh pemerintah kolonial. Bagi masyarakat desa hutan, hutan bukan hanya tempat tumbuhnya kayu, tetapi bagian dari ruang hidup sehari-hari. Dari hutan, masyarakat memperoleh kayu bakar, bahan bangunan, pakan ternak, daun-daunan, dan berbagai kebutuhan lain yang menopang kehidupan keluarga. Karena itu, ketika pemerintah kolonial menempatkan hutan sebagai milik negara dan membatasi akses masyarakat terhadapnya, perubahan tersebut tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menyentuh hubungan sosial masyarakat dengan alam sekitarnya.

Dalam ajaran Samin, tanah, air, dan kayu dipahami sebagai bagian dari milik bersama. Pandangan ini bertentangan dengan cara berpikir pemerintah kolonial yang menempatkan hutan sebagai milik negara dan hasilnya sebagai sumber ekonomi kolonial. Bagi masyarakat Samin, pemerintah Belanda tidak memiliki hak moral untuk mengatur secara sepihak apa yang boleh dan tidak boleh diambil dari hutan. Dari sinilah penolakan terhadap penguasaan hutan kolonial memperoleh dasar moralnya.

Penolakan tersebut tampak jelas dalam pemberitaan *De Locomotief* tanggal 18 Maret 1907. Dalam artikel berjudul “Gevangenneming van Soeriontiko alias Samin c.s.” disebutkan bahwa dalam ajaran baru Samin, orang tidak perlu lagi membayar pajak dalam bentuk uang, tidak perlu lagi melakukan kerja paksa, dan dapat mengambil kayu dari hutan secara bebas. Keterangan ini penting karena memperlihatkan bahwa perlawanan Samin tidak hanya berkaitan dengan pajak, tetapi juga dengan penolakan terhadap kerja paksa dan klaim pemerintah kolonial atas hutan.³³

Laporan penyelidikan Jasper tahun 1918 memperlihatkan ketegangan tersebut secara cukup jelas, terutama dalam Hoofdstuk VI yang secara khusus membahas “De gedragslijn van den Dienst van het Boschwezen” atau kebijakan Dinas Kehutanan. Dalam bagian itu, Jasper menyoroti

³¹ Javaansche anarchisten,” *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie*, 12e jaargang, no. 62, 15 Maret 1907, hlm. 2, kol. 1–2, koleksi Delpher.

³² *Verslag Saminbeweging* (1918), op.cit hlm. 7

³³ *Gevangenneming van Soeriontiko alias Samin c.s.*,” *De Locomotief*, 18 Maret 1907, No. 65, 56e Jaargang, Tweede Blad.

salah satu persoalan penting yang muncul di wilayah Samin, yaitu sengketa mengenai *sprokkelrecht* atau hak penduduk untuk memungut kayu ranting yang telah jatuh.³⁴ Secara hukum, masyarakat sebenarnya masih diperbolehkan mengambil kayu yang sudah jatuh dari pohon. Namun, dalam praktiknya, batas antara kegiatan *sprokkelen* yang dianggap sah dan tindakan *boschdiefstal* atau pencurian kayu menjadi sangat kabur. Kekaburan inilah yang kemudian memberi ruang bagi aparat Boschwezen untuk menafsirkan aturan secara sepihak. Hal ini tampak dalam surat edaran Inspektur Boschwezen Jaski kepada seluruh pengawas hutan tertanggal 17 November 1915. Dalam surat tersebut, Jaski menegaskan bahwa setiap pengambilan kayu yang dinilai masih layak untuk kepentingan eksploitasi komersial harus diperlakukan sebagai pencurian, sekalipun kayu itu berasal dari pohon yang telah mati atau tumbang secara alami.³⁵

Ketegangan antara masyarakat Samin dan *Boschwezen* menunjukkan bahwa persoalan hutan bukan sekadar masalah pelanggaran hukum biasa. Pada 28 Oktober 1915, Kepala Inspektur *Boschwezen* mengirimkan *Geheime Missive* atau surat rahasia No. 177/Geh. kepada Direktur *Binnenlands Bestuur*. Surat tersebut penting karena memperlihatkan bahwa persoalan antara aparat kehutanan dan masyarakat di wilayah sekitar Blora-Bojonegoro telah menjadi perhatian serius pemerintah kolonial. Dengan masuknya persoalan ini ke dalam komunikasi internal pemerintah, dapat dilihat bahwa konflik kehutanan tidak lagi dianggap sebagai masalah kecil di tingkat desa, tetapi sudah dipahami sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas dalam pengelolaan masyarakat dan hutan kolonial.³⁶

Masyarakat Samin tidak memandang hutan sebagai mesin produksi kayu, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari hutan, masyarakat memperoleh bahan bakar, bahan bangunan, pakan ternak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika akses terhadap hutan dibatasi, yang terganggu bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu, sikap masyarakat Samin yang tetap mempertahankan pandangan bahwa tanah, air, dan kayu adalah milik bersama dapat dibaca sebagai usaha menjaga ruang hidup dari klaim sepihak pemerintah kolonial.

Penolakan terhadap Lumbung Desa

Penolakan masyarakat Samin terhadap lumbung desa merupakan salah satu bentuk perlawanan yang tampak sederhana, tetapi memiliki makna penting. Lumbung desa pada dasarnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi atau benih padi untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan desa, lumbung dapat dipahami sebagai lembaga cadangan pangan yang membantu masyarakat ketika menghadapi masa sulit, kekurangan benih, atau kebutuhan mendesak menjelang musim tanam. Namun, dalam konteks pemerintahan kolonial, lumbung desa tidak berdiri sebagai lembaga netral. Lumbung berada di bawah pengawasan kepala desa dan masuk dalam jaringan administrasi desa yang berhubungan dengan pemerintah kolonial. Karena itu, ketika masyarakat Samin menolak lumbung desa, penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan padi, tetapi juga dengan penolakan terhadap ikatan desa yang telah dikuasai oleh struktur kolonial.³⁷

Pemerintah kolonial kemudian memperkenalkan sistem yang lebih formal dibandingkan lumbung padi tradisional, yaitu *dessakassen* atau kas desa berbasis uang yang diberlakukan secara bertahap di berbagai keresidenan. Di Bojonegoro, sistem ini mulai diperkenalkan pada

³⁴ *Verslag betreffende het onderzoek in zake de Saminbeweging, ingesteld ingevolge het Gouvernements Besluit van 1 Juni 1917, No. 20* (Batavia: Landsdrukkerij, 1918), hlm. 60

³⁵ *Verslag Saminbeweging* (1918), hlm. 63.

³⁶ Harry J. Benda dan Lance Castles, "The Samin Movement," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 125, No. 2, 1969, hlm. 214.

³⁷ *Verslag betreffende het Onderzoek in zake de Saminbeweging, ingesteld ingevolge het Gouvernements Besluit van 1 Juni 1917 No. 20* (Batavia: Landsdrukkerij, 1918), hlm. 4.

tahun 1912 oleh seorang kontrolir bernama Schnitzler. Ia menerapkan prinsip bahwa setiap kas desa, sejauh mungkin, harus mencapai nilai minimal f 50 setiap tahun.³⁸ Ketentuan ini menimbulkan persoalan baru, terutama bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah komunal untuk disisihkan sebagai sumber kas desa. Dalam keadaan demikian, beban pengisian kas dialihkan kepada para pemilik tanah melalui kewajiban membayar iuran tunai. Dengan kata lain, *dessakassen* bukan sekadar mekanisme administratif desa, melainkan juga bentuk pungutan baru yang menambah berat beban masyarakat. Kebijakan ini muncul pada saat yang tidak menguntungkan, ketika komunitas Samin di Bojonegoro telah lebih dahulu berada dalam tekanan akibat berbagai kewajiban kolonial yang terus menumpuk.³⁸

Dalam laporan penyelidikan Samin tahun 1918, Jasper mencatat bahwa pada akhir tahun sebelumnya pengikut Samin mulai memisahkan diri dari warga desa lainnya. Mereka tidak mau bekerja sama dalam pendirian *dessaloemboengs* atau lumbung desa, tidak mau menyimpan benih padi dalam lumbung bersama di bawah kepala desa, dan dalam afdeling Bojonegoro mereka juga tidak mau menempatkan ternak dalam kandang bersama. Keterangan ini menunjukkan bahwa penolakan masyarakat Samin bukan hanya diarahkan kepada pemerintah kolonial secara jauh, tetapi juga kepada lembaga-lembaga desa yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan tersebut.³⁹

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa penolakan terhadap lumbung desa bukan sekadar keengganan menyimpan padi secara bersama-sama. Hal yang ditolak terutama adalah kewajiban menyerahkan padi bibit ke dalam lembaga yang dikelola oleh kepala desa. Penolakan itu menunjukkan keberatan terhadap bertambahnya kewenangan aparat desa dalam mengatur hasil pertanian penduduk. Dengan demikian, lumbung desa menjadi salah satu ruang pertemuan antara kepentingan pemerintah untuk menata kehidupan desa dan keinginan masyarakat Samin untuk mempertahankan kemandirian dalam mengelola hasil pertaniannya.⁴⁰



Gambar 4. Penolakan Pengikut Samin terhadap Lumbung Desa.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 15 Maret 1907, No. 62, 12e Jaargang, Eerste Blad, hlm. 2.

³⁸ *Verslag Saminbeweging* (1918), hlm. 43

³⁹ *Ibid.*, hlm. 44

⁴⁰ *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie*, 15 Maret 1907, No. 62, 12e Jaargang, Eerste Blad, hlm. 2.

Penolakan terhadap lumbung desa juga disebut sebagai bagian dari perubahan sikap masyarakat Samin pada awal abad ke-20. Disebutkan bahwa sekitar tahun 1905 orang Samin mulai meninggalkan cara hidup masyarakat desa pada umumnya, tidak suka menyetorkan padi ke lumbung desa, dan ketika membayar pajak tidak menganggapnya sebagai kewajiban, melainkan sebagai sokongan sukarela. Keterangan ini sejalan dengan laporan kolonial yang menunjukkan bahwa penolakan terhadap lumbung desa muncul bersamaan dengan penolakan terhadap pajak dan kewajiban desa lainnya.⁴¹

Penolakan masyarakat terhadap *dessakassen* ternyata juga diakui oleh pejabat kolonial sendiri. Pada 29 Juli 1916, Asisten Residen Bojonegoro menulis surat kepada Residen Rembang dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut ternyata dipaksakan bertentangan dengan kehendak penduduk. Dalam laporan Jasper dikutip kalimat: *“een maatregel in te voeren, welke achteraf gebleken is tegen den zin der bevolking gepousseerd te zijn. Als zoodanig moet hij afgekeurd worden.”* Artinya, sebuah kebijakan telah diberlakukan dan kemudian terbukti dipaksakan bertentangan dengan kehendak penduduk; karena itu, kebijakan tersebut harus ditolak atau tidak dapat dibenarkan.⁴²

Dalam laporan Jasper juga memperlihatkan bahwa *dessakassen* di desa-desa yang menolak berkontribusi berada dalam keadaan sulit. Kontrolir Bojonegoro yang menggantikan Schnitzler mencatat bahwa kas desa yang warganya menolak berurutan dan tidak memiliki pemasukan dari tanah, cepat atau lambat, akan berhenti ada. Keterangan ini menunjukkan bahwa penolakan masyarakat benar-benar menghambat berjalannya sistem kas desa. Dengan kata lain, perlawanan Samin bukan hanya bersifat simbolis, tetapi berdampak langsung pada kelangsungan lembaga yang hendak dibentuk pemerintah kolonia.⁴³

Penolakan terhadap lumbung desa dan *dessakassen* merupakan salah satu bentuk penting dari perlawanan masyarakat Samin di Bojonegoro. Penolakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin tidak hanya menolak kebijakan yang secara langsung datang dari pemerintah kolonial, tetapi juga lembaga desa yang telah menjadi bagian dari sistem kolonial. Lumbung desa dan kas desa yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan bersama berubah menjadi lembaga yang menimbulkan kewajiban, pungutan, dan pengawasan. Karena itu, penolakan masyarakat Samin terhadap lembaga tersebut dapat dipahami sebagai usaha mempertahankan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat desa dari kontrol kolonial.

Respon Pemerintah Belanda

Respon pemerintah kolonial Belanda terhadap perlawanan masyarakat Samin di Bojonegoro tidak langsung berbentuk kekerasan terbuka. Pada tahap awal, pemerintah kolonial lebih banyak melakukan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan terhadap perkembangan ajaran Samin. Hal ini dapat dipahami karena perlawanan Samin tidak muncul dalam bentuk pemberontakan bersenjata, melainkan berupa penolakan terhadap pajak, kerja wajib, penguasaan hutan, lumbung desa, dan berbagai kewajiban administratif lainnya. Bentuk perlawanan yang pasif ini membuat pemerintah kolonial mengalami kesulitan untuk menanganinya, sebab masyarakat Samin tidak menyerang aparat secara langsung, tetapi juga tidak sepenuhnya.

Pengawasan tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih tegas. Pada tahun 1907, pemerintah kolonial menangkap Samin Surosentiko bersama sejumlah pengikutnya. Dalam pemberitaan *De Locomotief*, penangkapan itu dilakukan karena pemerintah menganggap

⁴¹ Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, *Sejarah Kabupaten Bojonegoro: Menyingkap Kehidupan dari Masa ke Masa* (Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, 1988), hlm. 186.

⁴² *Verslag betreffende het Onderzoek in zake de Saminbeweging*, op. cit., hlm. 44

⁴³ Ibid., hlm.45

ajaran Samin mulai berbahaya bagi ketertiban. Para pemimpin gerakan dianggap perlu diamankan agar ajaran tersebut tidak semakin meluas. Menariknya, penangkapan itu tidak digambarkan sebagai penumpasan pemberontakan bersenjata, sebab Samin dan pengikutnya tidak melakukan perlawanan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial sebenarnya berhadapan dengan gerakan yang tidak mudah dikategorikan sebagai pemberontakan biasa.⁴⁴

Penangkapan Soerontiko Samin dan sejumlah tokoh pengikutnya kemudian diikuti dengan tindakan pengasingan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya berusaha menghentikan aktivitas Soerontiko Samin di Blora, tetapi juga memutus hubungan antara pemimpin gerakan dengan para pengikutnya di daerah asal. Soerontiko Samin bersama sejumlah pengikutnya dipindahkan jauh dari lingkungan sosial tempat ajarannya berkembang. Pengasingan dengan demikian menjadi bentuk pengendalian politik yang bertujuan mempersempit ruang gerak tokoh-tokoh Samin dan mencegah penyebaran pengaruh mereka.⁴⁵

Setelah penangkapan, pemerintah kolonial memilih jalan pengasingan terhadap Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya. Samin kemudian dibuang ke Padang dan meninggal di sana pada tahun 1914. Kebijakan pengasingan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial berusaha memutus hubungan antara pemimpin gerakan dengan para pengikutnya. Dalam logika kolonial, jika pemimpinnya dijauhkan dari basis sosialnya, maka ajaran tersebut diharapkan akan melemah. Namun, dalam kenyataannya, pembuangan Samin tidak sepenuhnya menghentikan perkembangan Saminisme. Ajaran tersebut tetap hidup dalam komunitas pengikutnya, termasuk di wilayah Bojonegoro.⁴⁶

Dalam pemberitaan kolonial, masyarakat Samin juga sering diberi cap negatif. Mereka dapat digambarkan sebagai kelompok yang membangkang, menolak aturan, atau mengganggu ketertiban. Pelabelan seperti ini merupakan bagian dari respon kolonial, karena melalui bahasa semacam itu pemerintah dan pers kolonial berusaha menjelaskan Saminisme dari sudut pandang kekuasaan. Padahal, jika dilihat dari sisi masyarakat Samin, tindakan mereka bukan sekadar pembangkangan, melainkan bentuk penolakan terhadap kewajiban yang dianggap tidak adil. Perbedaan sudut pandang ini membuat Saminisme sering disalahpahami dalam sumber-sumber kolonial.⁴⁷

Respon pemerintah kolonial terhadap gerakan Samin kemudian memasuki tahap yang lebih resmi melalui dikeluarkannya keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juni 1917. Dalam keputusan tersebut, Asisten Residen Tuban, J. E. Jasper, diberi tugas untuk melakukan penyelidikan mengenai keluhan-keluhan ekonomi para pengikut gerakan Samin serta mencari cara bagaimana keluhan tersebut dapat ditanggapi oleh pemerintah. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak lagi melihat Saminisme hanya sebagai persoalan ketertiban desa, tetapi juga sebagai masalah sosial-ekonomi yang perlu diselidiki secara khusus.⁴⁸

Keputusan tersebut juga meminta Residen Rembang, Semarang, Kediri, dan Madiun untuk memberikan bantuan kepada Jasper dalam menjalankan tugas penyelidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa gerakan Samin telah dipandang sebagai persoalan lintas wilayah, bukan hanya masalah lokal di satu desa atau satu afdeling. Dengan melibatkan beberapa keresidenan, pemerintah kolonial menunjukkan bahwa penyebaran Saminisme dianggap cukup luas dan membutuhkan perhatian administratif yang lebih serius.

⁴⁴ *De Locomotief*, "Gevangenneming van Soeriontiko alias Samin c.s.," 18 Maret 1907, No. 65, *Tweede Blad*, hlm. 2.

⁴⁵ Harry J. Benda dan Lance Castles, "The Samin Movement," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 125, No. 2, 1969, hlm. 216.

⁴⁶ *De Nieuwe Vorstenlanden*, "De Samin-beweging herleeft," 30 Juli 1928, No. 170

⁴⁷ Tjipto Mangoenkoesoemo, *Het Saminisme: Rapport Uitgebracht aan de Vereeniging "Insulinde"* (Semarang: N.V. Semarang-Drukkerij en Boekhandel H. A. Benjamins, 1918), hlm. 64.

⁴⁸ *Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië*, Batavia, 1 Juni 1917, No. 20

Dengan demikian, respon pemerintah kolonial Belanda terhadap perlawanan Samin dapat dilihat dalam tiga bentuk utama. Pertama, pemerintah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap tokoh Samin, terutama pada tahun 1907. Kedua, pemerintah melakukan penyelidikan resmi melalui keputusan Gubernur Jenderal tahun 1917 yang menugaskan Jasper untuk memeriksa keluhan ekonomi pengikut Samin. Ketiga, setelah penyelidikan, pemerintah tetap mempertimbangkan tindakan penyingkiran terhadap para pemimpin Samin karena perlawanan pasif dianggap mengancam ketertiban kolonial.

Respon pemerintah kolonial justru memperlihatkan kekuatan perlawanan Samin. Jika perlawanan ini dianggap kecil, pemerintah tidak perlu melakukan penangkapan, mengeluarkan keputusan Gubernur Jenderal, menugaskan Jasper, dan mempertimbangkan penerapan Pasal 47 *E.B.* terhadap para pemimpin Samin. Fakta bahwa pemerintah melakukan semua itu menunjukkan bahwa perlawanan pasif masyarakat Samin dipandang sebagai ancaman serius. Perlawanan tersebut memang tidak meledak dalam perang terbuka, tetapi cukup kuat untuk mengganggu pajak, kerja wajib, kewajiban desa, dan ketertiban administratif kolonial.⁴⁹

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat Bojonegoro pada tahun 1890–1917 yang melatarbelakangi munculnya Gerakan Samin berkaitan erat dengan semakin kuatnya penguasaan pemerintah kolonial terhadap tanah, hutan, tenaga kerja, dan kehidupan masyarakat desa. Bojonegoro merupakan wilayah agraris yang memiliki kawasan hutan jati luas, tetapi sebagian tanah pertaniannya kurang subur dan kehidupan masyarakatnya bergantung pada pertanian serta hasil hutan. Pemerintah kolonial menjadikan hutan jati sebagai sumber kepentingan ekonomi melalui pengawasan *Boschwezen*, penerapan berbagai peraturan kehutanan, serta penggunaan tenaga masyarakat dalam sistem *blandongdiensten*. Masyarakat juga menghadapi pajak, kewajiban kerja, utang, serta pungutan dan lembaga desa yang semakin banyak diatur oleh pemerintah kolonial.

Gerakan Samin mulai berkembang di Bojonegoro sejak tahun 1890, ketika tercatat lima orang pengikut di Desa Tapelan, Onderdistrict Ngraho, District Tambakredjo. Penyebarannya berlangsung melalui hubungan keluarga, komunikasi antardesa, dan kedekatan wilayah Bojonegoro dengan Blora. Pada tahun 1917, pemerintah kolonial mencatat sebanyak 283 kepala keluarga Samin di Bojonegoro. Data tersebut menunjukkan bahwa Bojonegoro menjadi salah satu wilayah penting dalam perkembangan Gerakan Samin.

Perlawanan masyarakat Samin dilakukan melalui penolakan membayar pajak, kerja wajib, penguasaan hutan, lumbung desa, *dessakassen*, serta ketidakpatuhan terhadap aturan administratif. Hasil wawancara dengan Bambang Sutrisno menunjukkan bahwa perlawanan tersebut didasarkan pada nilai kejujuran, kesetaraan, kerja keras, dan penolakan terhadap kekerasan. Tindakan tersebut sesuai dengan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott karena dilakukan tanpa organisasi politik formal dan tanpa pemberontakan bersenjata. Peristiwa sengketa tanah Tapelan tahun 1914 menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, ketidakpatuhan dapat berkembang menjadi konfrontasi terbuka untuk mempertahankan tanah yang telah dikerjakan.

Pemerintah kolonial merespons Gerakan Samin melalui pengawasan, penangkapan, pengasingan, penggunaan aparat, dan penyelidikan resmi pada tahun 1917. Penyelidikan tersebut tidak mengubah kawasan hutan menjadi hutan adat, tetapi mengakui adanya persoalan kekurangan tanah dan tekanan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mendukung pandangan

⁴⁹ Jasper, "Aanteekeningen," Januari 1918, hlm. 24.

bahwa Gerakan Samin merupakan perlawanan non-kekerasan, sekaligus memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa gerakan di Bojonegoro sangat berkaitan dengan persoalan tanah, hutan, hak garapan, dan kewajiban desa.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian dalam sejarah lokal, khususnya mengenai perlawanan masyarakat pedesaan terhadap kolonialisme Belanda. Kajian tentang masyarakat Samin perlu terus dikembangkan karena gerakan ini tidak hanya berkaitan dengan perlawanan politik, tetapi juga menyangkut nilai budaya, moral, dan hubungan masyarakat dengan alam.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sumber primer yang lebih luas, terutama arsip kolonial, surat kabar sezaman, dan sumber lisan dari komunitas Samin. Dengan penggunaan sumber yang lebih beragam, penelitian mengenai Saminisme dapat menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam, terutama mengenai perkembangan gerakan Samin di Bojonegoro setelah tahun 1917.

Bagi masyarakat dan pemerintah daerah, sejarah komunitas Samin perlu dilihat sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang penting untuk dijaga. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam masih relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pelestarian sejarah dan budaya Samin dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sejarah lokal Bojonegoro.

REFERENSI

- Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 5164: Gouvernements Besluit 9 Februari 1897 No. 21.* (1897).
- Jasper, J. E. (1918a, Januari). *Aanteekeningen* [Catatan arsip].
- Jasper, J. E. (1918b). *Verslag betreffende het onderzoek inzake de Saminbeweging, ingesteld Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1865 No. 96: Hout-bosschen op Java en Madura. Voorschriften omtrent het beheer en de exploitatie.* (1865).
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1897 No. 61: Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera.* (1897).
- Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, 1 Juni 1917, No. 20.* (1917).
- Van Deventer, M. L. (1886). *Geschiedenis der Nederlanders op Java*. H. D. Tjeenk Willink.
- Van Gelder, W., & Lekkerkerker, C. (1928). *Schoolatlas van Nederlandsch-Indië* (19e herziene en vermeerderde druk). J. B. Wolters.
- Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indië over het jaar 1903.* (1903).
- Algemeen Handelsblad. 15 Januari 1921.
- Bataviaasch Nieuwsblad. 1921.
- De Indische Courant.
- De Locomotief. "Gevangenneming van Soeriontiko alias Samin c.s." 18 Maret 1907,
- De Nieuwe Vorstenlanden. "De Samin-beweging herleeft." 30 Juli 1928, No. 170. 75
- De Samin-beweging herleeft. (1928, 30 Juli).
- De Nieuwe Vorstenlanden, No. 170.
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, No.
- Departemen Kehutanan. (1986). *Sejarah kehutanan Indonesia I: Periode prasejarah-1942*. Departemen Kehutanan.

- Fadhilla, F. A., Wijaya, D. N., & Sapto, A. (2025). *Samin Surosentiko: Pelopor Saminisme khas Jawa tradisional*. Suluah Kato Khatulistiwa.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan petani Banten 1888*. Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar sejarah Indonesia baru, 1500–1900: Dari emporium sampai imperium* (Jilid 1). Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Munawaroh, S., Ariani, C., & Suwarno. (2015). *Etnografi masyarakat Samin di Bojonegoro: Potret masyarakat Samin dalam memaknai hidup*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Panitia Penggali dan Penyusun Sejarah Hari-Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. (1988). *Sejarah Kabupaten Bojonegoro: Menyingkap kehidupan dari masa ke masa*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
- Paulus, J. (Ed.). (1917). *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* (Tweede druk, Eerste deel A–G). Martinus Nijhoff & E. J. Brill.
- Penders, C. L. M. (1984). *Bojonegoro 1900–1942: A story of endemic poverty in North-East Java–Indonesia*. University of Queensland Press.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008). *Sejarah nasional Indonesia IV: Kemunculan penjajahan di Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Arif, Muhamad, Abdul Ghofur, dan Dhanang Respati Puguh, (2022), *The Pattern of Social Changes in the Samin Community and Its Influencing Factors*, Indonesian Historical Studies, Vol 5 (2)
- Benda, Harry J. dan Lance Castles, (1969), *The Samin Movement*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol 125 (2)
- King, Victor T., (1973), *Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java: Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol 129 (4),
- Korver, A. Pieter E., (1976), *The Samin Movement and Millenarism*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol 132 (2–3)
- Liani, Ita, Firza Fadilla, dan Agus Danugroho, (2021), *Asal Muasal Wong Jonegoro: Tinjauan Historis Hubungan Wong Kalang dan Masyarakat Samin Bojonegoro*, Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol 4 (2)
- Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, (2017), *The Saminist Movement of the Kendeng Mountains Complex of Java during the Dutch Colonial and Indonesia's Reform Eras*, Tawarikh: International Journal for Historical Studies, Vol 8 (2)
- Purwanto, Agus B., (2015), *Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol 10 (1)
- Shiraishi, Takashi, (1990), *Dangir's Testimony: Saminism Reconsidered*, Indonesia, No. 50
- Suhandano, (2020), *Javanese and the Samin Community: A Reflection of Ideology and Identity of Its Speakers*, Humaniora, Vol 32 (3)
- Sulistiyono, Singgih Tri, (2011), *Saministo Phobia*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol 16 (2)
- Widyarsono, A., (1998), *Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan*, Unisia, No. 36